



Universitas
Sumatera Utara

Transformation
Towards the Ultimate

Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

POLITIK DIGITAL: Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi

Oleh
Muryanto Amin

Disampaikan pada Sidang Terbuka
Universitas Sumatera Utara
di Auditorium USU

Medan, 6 Maret 2023



Universitas
Sumatera Utara

Transformation
Towards the Ultimate

Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

POLITIK DIGITAL: Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi

Oleh
Muryanto Amin

Disampaikan pada Sidang Terbuka
Universitas Sumatera Utara
di Auditorium USU

Medan, 6 Maret 2023

POLITIK DIGITAL: Transformasi Partai Politik Menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Sumatera Utara;

Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara;

Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara;

Para Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara;

Sekretaris, para Dekan, Direktur, dan Ketua Lembaga/Unit di Universitas Sumatera Utara;

Para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara; serta

Para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, izinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU). Saya dan keluarga juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara Pidato Pengukuhan Guru Besar pada pagi hari ini.



Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan USU, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik USU, yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU yang berjudul Politik Digital: Transformasi Partai Politik Menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi. Tema yang saya pilih dalam pidato pengukuhan ini berawal dari "kegelisahan" tentang kondisi perkembangan Ilmu Politik yang dihadapkan pada perubahan pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin kompleks karena konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang muncul sebagai alat mengelola ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta membentuk konstruksi baru, yang sangat berbeda terhadap partisipasi masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Fenomena Global Munculnya Politik Digital dan Partai Digital

Kita sedang merasakan perubahan peradaban dunia yang sangat cepat terjadi dalam dekade terakhir ini dan belum pernah terjadi sejak 100 tahun belakangan. Kecepatan perubahan peradaban itu terjadi karena kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mencermati kondisi tersebut, mengharuskan Presiden Jokowi, selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi, dalam setiap sambutannya pada berbagai kesempatan di seluruh lapisan masyarakat. Presiden memberi penekanan bahwa literasi digital bukanlah pilihan melainkan keharusan untuk mengurangi meningginya konsumerisme masyarakat Indonesia. Perspektif Presiden melihat fenomena digital dalam pembangunan Indonesia serta keterhubungannya dengan masyarakat global, tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital yang berubah dengan sangat cepat. Tetapi, masih sepi pembahasan isu-isu yang menjelaskan bahwa tantangan yang cukup penting untuk melakukan perubahan itu, justru berasal dari partai politik.

Belum begitu banyak kita menyadari bahwa fenomena digitalisasi politik telah melahirkan bentuk baru di bidang politik yaitu munculnya partai digital. Bentuk baru dari partai digital yang diterapkan pada partai politik tidak hanya diartikan sebagai partai yang menggunakan media digital hanya untuk kepentingan elektoral, melainkan mengubah proses digital dari analog untuk menjalankan program organisasi partai politik seperti ideologi (Seliger, 2019), kultur (Pye & Verba, 2015), kelembagaan (Harmel, et.al, 2019; Wolinetz, 2002; Sikk, 2022), kepemimpinan (Cross & Pilet, 2015), kaderisasi (Rahat & Hazan, 2001), dan peran lainnya untuk mengelola kekuasaan secara demokratis.

Para ilmuwan politik telah meneliti penggunaan situs web partai politik di Amerika Serikat (Druckman et al., 2009), Inggris (Gibson et al., 2005), Italia (Vaccari, 2008), partai politik di negara Islam (Howard, 2010), dan Asia (Postill, 2020). Mereka menjelaskan bahwa di negara-negara dengan indikator demokrasi yang tinggi, partai politik cenderung menggunakan *platform* digital untuk melaksanakan programnya. Sementara, di negara dengan ukuran demokrasi yang rendah, partai politik jarang menggunakan media daring untuk menyebarkan programnya. Penggunaan internet oleh partai politik lebih ditentukan kekhasan sistem politik negara ketimbang memahami perbedaan kesenjangan digital masyarakatnya. Meskipun, penelitian para ilmuwan politik itu, masih memerlukan beragam pendekatan kontekstual dan komparatif yang mendalam karena menurut Calderaro (2014), persaingan antar partai yang menggunakan digital, dalam kompetisi politik, ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berbeda-beda dan berlaku di setiap negara. Perbedaan kontekstual menempatkan pola penggunaan digital yang berbeda di partai politik, juga sudah terjadi di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia. Seluruh hasil riset tersebut, memberikan pesan yang sangat penting tentang perubahan yang sulit dihindari partai politik untuk melakukan penyesuaian mengelola organisasinya. Pertanyaan kemudian yang perlu dijawab adalah seberapa penting dan bagaimana melakukan transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital untuk penguatan demokrasi?

Hadirin yang saya hormati,

Digital Space sebagai Bentuk Demokrasi dan Kekuasaan Baru


Teori kekuasaan menjadi teori yang paling banyak dipelajari dan diteliti dalam studi Ilmu Politik. Keterkaitan antara kekuasaan dengan demokrasi menjadi fenomena yang sangat sulit dihindari ketika kompetisi kekuasaan harus mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai haknya. Demokrasi memberikan berbagai persyaratan untuk mendapatkan kekuasaan yang terus menerus mengalami penyesuaian karena perubahan pola hidup masyarakat yang berbeda-beda agar kekuasaan diperoleh secara damai (Rauf, 2001). Sumber-sumber kekuasaan yang dipelajari selama ini dalam studi politik, seperti paksaan fisik, keahlian, penguasaan tanah, status sosial, popularitas, kekayaan, dan jabatan (Budiardjo, 2003) tengah terkoreksi secara terus menerus serta mengalami proses pendalaman demokrasi (*democracy deepening*).

Konsep ruang publik dalam makna demokrasi Habermas (1991), misalnya diartikan sebagai cara masyarakat melakukan komunikasi dan advokasi yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain secara inklusif dan deliberatif. Bentuk ruang publik yang dimaksud berfokus pada institusi yang dijadikan sebagai media partisipasi masyarakat. Saat ini, konsep itu menjadi kurang relevan akibat kemajuan penggunaan teknologi informasi secara masif di masyarakat yang melahirkan *digital space* yaitu seluruh komunikasi dan advokasi masyarakat dalam ruang publik dapat dikelola secara digital. Melalui *digital space*, ruang publik bisa didapatkan dan dikelola kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. *Digital space* juga mampu mengubah *resources* apapun, misalnya mengartikan kata tanah (*land*), tidak hanya berupa fisik tanah yang menyebar ke samping, tetapi tanah juga harus diartikan ke atas dan ke bawah dari tanah itu seperti *cloud* dan sumber energi (*energy resources*). Itulah yang disebut sebagai *digital space*, yaitu ruang digital yang dapat dijadikan sumber kekuasaan. Jika sebelumnya sumber kekuasaan berasal dari para pemilik tanah, maka saat ini sumber kekuasaan juga berasal dari pemilik *digital space* atau orang-orang yang memiliki data *digital space* tentang tanah dan sumber energi di dalamnya. Saya ingin menyatakan bahwa tuan tanah (*lord of land*) tidak

cukup kuat berhadapan dengan tuan data yang menguasai *space* (*lord of data space*) untuk mendapatkan kekuasaan. Akibat munculnya tuan data (*lord of data*) itu, akan berimplikasi tidak hanya menguasai tanah tetapi juga menguasai urusan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bahkan melebihi kekuatan negara.

Digital *space* yang saat ini, telah menjadi alat demokrasi dan sumber kekuasaan baru, masih sulit dipahami oleh sebagian sarjana politik (*political scholars*) apalagi aktivis politik atau politisi. Namun, digital *space* sudah dinikmati oleh korporasi (*private sector*) dengan mengubah logika ekonomi tentang aset, *purchasing*, *store*, dan lainnya dari manual menjadi digital. Kemajuan proses bisnis di industri digital *platform*, menyajikan kepada para konsumennya kemudahan *supply and demand*, tanpa harus berinvestasi memiliki aset dan bahan dasar komoditi yang diperdagangkan. Sebagai contoh, perusahaan transportasi berbasis digital, tidak harus memiliki kendaraan, supir, dan pool serta mengubah bahkan menghapus fungsi keagenan (*intermediary*). Proses bisnis seperti itulah yang dilakukan oleh korporasi yang menggunakan digital *space* sebagai *core* nya. Mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung (*end to end*) dan menggantikan *man power* menjadi *artificial intelligence* (AI) sebagai agen (*intermediary*) harus dilakukan tanpa henti, karena memperhitungkan efisiensi, kepastian, dan mengurangi bias yang akan muncul.

Korporasi pengguna *platform* digital itu, saat ini, bukan hanya mendapatkan kepercayaan konsumen dan keuntungan ekonomi tetapi juga telah melampaui kemampuan negara menghimpun *resources* yang dimiliki. Tidak heran misalnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 60 persen belanja iklan kita, telah diambil oleh media digital terutama *platform-platform* asing (Kompas, 2023). Data tahun 2022, yang disampaikan perusahaan Insider Intelligence (2023), total belanja global TikTok berhasil mendapatkan iklan sebesar Rp 158 triliun dan jika dibandingkan dengan total belanja iklan media di Indonesia hanya Rp 135 triliun. Jika diasumsikan kepercayaan dan keuntungan ekonomi dalam kasus tersebut, sebagai bentuk kekuasaan baru yang masih sulit



terdeteksi oleh negara. Maka menjadi penting bagi ilmuwan dan aktivis politik menerima digital *space* sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru, yang bekerja untuk mendapat keuntungan dalam studi ilmu politik terutama studi tentang peran partai politik di era digital.

Hadirin yang saya hormati,

Pentingnya Partai Politik di Indonesia Menjadi Partai Politik Digital

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa penting partai politik bertransformasi menjadi organisasi partai di era digital untuk memperkuat demokrasi ketika masyarakat berubah secara dinamis akibat kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi.

Pertama, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di dunia mencapai 5,3 miliar orang atau sebanyak 66% dari populasi dunia telah menggunakan internet. Menurut catatan dari International Telecommunication Union (ITU), jumlah kenaikan tersebut sebesar 4,9 miliar orang atau 8,16% dibandingkan setahun sebelumnya. Sedangkan, rerata waktu yang digunakan masyarakat global untuk mengakses internet adalah selama 403 menit atau 6 jam 43 menit. Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212 juta pada Januari 2023 atau sekitar 77% dari populasi Indonesia. Rerata waktu orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya dan sebanyak 98,3% dari data penggunaannya memakai telepon genggam (dataindonesia.id, 2023). Meskipun, menurut catatan *We Are Social*, sebanyak 63,5 juta penduduk Indonesia belum terkoneksi internet (wearesocial, 2022).

Profil pengguna internet di Indonesia tahun 2021-2022, secara berurut didominasi oleh usia 13-18 tahun sebanyak 99,16%, usia 19-34 tahun mencapai 98,64%, usia 35-54 mencapai 87,30%, umur 5-12 tahun sebesar 62,43%, terakhir usia 55 tahun ke atas hanya 51,73%. Berdasarkan jumlah pendapatan, secara berurut, penghasilan Rp 5-15 juta mencapai 96,83%, pendapatan lebih dari Rp 15 juta sebanyak 88,53%, pendapatan lebih dari Rp 1-5 juta sebesar 88,07%, kurang dari Rp 1 juta mencapai 67,46%. Ketika

dilihat dari sebaran wilayah, Kalimantan tercatat pengguna internet paling tinggi mencapai 79,09%, Jawa sebesar 78,39%, Sumatera sebanyak 76,62%, Sulawesi 75,05%, Maluku sebanyak 69,74%, NTB-Bali sebesar 68,48% dan 68,47%, terakhir Papua hanya 68,03% (APJII, 2022). Data tersebut menunjukkan kenaikan pengguna internet sebesar 3,32% dari tahun sebelumnya dan tumbuhnya berasal dari masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian, digital *space* akan semakin memberi ruang kebebasan tanpa batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian dari elit dan pengurus partai politik.

Kedua, secara teoritis, partai politik bekerja menggunakan pedoman regulasi negara seperti strukturalisasi yang kaku dan tergantung pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan politik yang berbeda dan berlaku di setiap negara. Sementara enam fungsi partai politik, yang selalu dijadikan rujukan di Indonesia, diharapkan dapat menumbuhkan partai politik yang sehat dan menjadi katalisator antara masyarakat dan pemerintah. Namun, implementasi aturan di partai politik, justru membuat partai politik selalu gagal menyesuaikan dirinya dengan kemajuan teknologi, perubahan pola hidup, dan merespon tuntutan masyarakat yang semakin demanding. Semakin kuatnya perubahan pola hidup masyarakat, partai politik tetap masih mempertahankan cara-cara lama hanya untuk kepentingan elektoral seperti mementingkan strukturalisasi, mengutamakan popularitas, keputusan yang sentralistis, dan oligarkis (Hadiz & Robison, 2004). Meskipun proses elektoral selalu menghasilkan keterwakilan politik yang sesuai indikator demokrasi prosedural, namun substansi yang mengharuskan fungsi partai politik dilakukan, masih mengalami beragam hambatan. Partai politik kita, selalu kehilangan keberanian untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas karena kultur yang terbentuk selalu mengutamakan rutinitas dan kepastian untuk menang dalam kompetisi elektoral meski melakukan segala cara yang tidak demokratis. Paradoks yang disebutkan itu dan yang selalu muncul serta sangat terbuka di media sosial, harus segera disikapi partai politik dengan memanfaatkan teknologi.



Ketiga, ruang publik yang telah berubah menjadi *digital space*, akan memberikan peluang sangat besar, percepatan penguatan demokrasi dan praktik menjalankan kekuasaan yang mengutamakan kesejahteraan bersama (*common welfare*). Fungsi pendidikan politik dan kaderisasi menjadi bagian yang sangat penting dari partai politik untuk melatih calon pemimpin yang cepat melakukan *mega shift skills* karena perubahan yang sangat sulit diprediksi. Melalui kedua fungsi itu, partai politik akan menempatkan orang-orangnya dalam jabatan publik yang memberi arah kebijakan yang jelas, menjalankan kepemimpinan strategik, fokus, dan konsisten. Kebebasan mendapatkan data dan informasi apapun sangat terbuka luas yang menyebabkan pejabat publik harus memiliki *sense of digital* yang akurat. Data dan informasi yang sangat mudah diolah menggunakan *artificial intelligence*, menyebabkan borderless antar negara itu berada di depan mata kita. Namun, ketika partai politik tidak cepat merespon perubahan manual menjadi digital dalam organisasinya maka terciptalah sebuah ironi. Ironi yang menggambarkan suatu situasi ketika dunia dihadapkan pada disrupsi teknologi yang menuntut partai politik menjadi turbin penggerak menghasilkan pemimpin dan perwakilan politik untuk merespon perubahan yang cepat dan mendadak itu, tetapi partai politik masih mempertahankan cara-cara analog yang sudah sangat usang.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, bahwa *private sector* atau dunia industri telah menerima manfaat *digital space* yang sangat besar dan bahkan melampaui kemampuan negara. Meskipun, dunia industri bukanlah institusi yang memiliki kewenangan yang melewati batasnya, tetapi logika Smith (1937) ratusan tahun lalu, tentang *invisible hand* menemukan bentuk barunya di era digital ini. Lahirnya data raksasa (*big data*) yang dijelaskan Kitchin (2014) memiliki karakter 5Vs, yaitu *Velocity* (data cepat berubah secara *real time*), *Volume* (data dengan jumlah yang besar), *Variety* (keragaman bentuk), *Value* (nilai data yang sangat berharga), dan *Veracity* (data yang memiliki akurasi), mengharuskan partai politik segera menyesuaikan dan bergerak mengubah pola kerja organisasinya. Sebagian

besar masyarakat telah merespon disrupsi teknologi dan keberadaan big data dengan menuntut partai politik untuk selalu aktif bekerja langsung merespon kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang kompleks secara rutin, bukan sekedar hadir untuk kepentingan elektoral saja. Partai politik harus menggunakan digital *space* bukan hanya untuk mendeteksi perilaku politik menjelang elektoral, tetapi harus melakukan sesuatu yang mensejahterakan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara tanpa jeda sedikitpun.

Proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh negara membutuhkan durasi yang panjang dan *endurance* yang kuat serta selalu menyerap sumber daya yang tidak sedikit. Bahkan, tidak jarang, setiap menetapkan suatu kebijakan, pasti memerlukan pembiayaan yang lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh masyarakat. Partai politik memiliki potensi kontribusi mencegah atau menambah masalah dampak dari kebijakan itu sejak awal. Negara memerlukan partai politik sebagai katalisator-katalisator dengan kewenangannya untuk mempermudah proses kebijakan yang tepat dan mampu mengatasi masalah. Model pengelolaan partai politik yang hierarkis dan tersentralisasi, serta pengambilan keputusan oligarki, juga sering menambah masalah kerumitan di masyarakat. Lebih dari itu, konsolidasi demokrasi akan memerlukan waktu yang lama karena telatnya partai politik membantu menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Mengambil istilah para ahli kebijakan publik, suatu kebijakan sering mengalami *time-lag* atau *decision making delay*, yaitu ada jeda waktu saat merumuskan dengan implementasi kebijakan (Jovanovski & Muric, 2019). Fungsi agregasi politik yang harus dilakukan partai politik memberi sumbangan ide untuk menetapkan kebijakan, jika dilakukan dengan cara manual, maka akan berpotensi menambah kerumitan kebijakan itu.

Kita bisa merasakannya di Indonesia, persoalan *time-lag* ini, jika kita melihat interaksi antara partai politik dengan pemerintah saat merumuskan Rencana Pembangunan Nasional maupun Daerah yang dilakukan setiap lima tahunan atau setiap tahun anggaran. Kita akan kesulitan menemukan peran partai politik dalam setiap tahapan proses



perumusan yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Meskipun partai politik memiliki infrastruktur kelembagaan sampai ke tingkat ranting, namun masih sulit kita temukan pengurus partai maupun kader yang paling bawah memiliki dokumen usulan yang tersusun sebagai usulan partai politik. Usulan program yang akan masuk dalam rencana pembangunan pemerintah tersebut, semestinya menjadi bagian penting tugas partai politik yang akan dikawal oleh perwakilannya di parlemen. Kebanyakan yang terjadi adalah, program pembangunan infrastruktur pemerintah dijadikan sebagai partai politik memenuhi kebutuhan pembiayaan partainya (Mietzner, 2015). Bahkan perencanaan bukan bagian dari solusi, tetapi justru menjadi masalah karena partai politik dan elitnya mengintervensi untuk tujuan korupsi (Keban, 2019).

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Kelembagaan partai politik menjadi sangat penting untuk membantu melakukan fungsi partai politik yang seharusnya bersanding dengan program pemerintah. Namun, partai politik yang disebut sebagai partai mapan pun masih mengalami keterbatasan mengelola kompleksitas masalah menjalankan fungsi kelembagaannya. Keterbatasan ini, kemudian membuat pengurus atau elit partai politik tidak memiliki banyak alternatif pilihan memperbaiki model pengelolaan kelembagaannya. Jangankan diharapkan mampu merumuskan strategi untuk menjalankan fungsi partainya secara utuh, partai politik cenderung hanya memilih strategi yang dianggapnya cukup memuaskan persepsi rasional kepentingannya sendiri. Namun, sejalan dengan kemajuan teknologi, ada banyak peluang yang bisa dilakukan mempercepat penataan kelembagaan partai politik misalnya kendala waktu, biaya, dan kemampuan untuk memproses informasi, yang sangat mungkin menjadi solusi mengatasinya.

Integrasi informasi, komunikasi, dan teknologi yang telah digunakan oleh sektor swasta dan sebagian kecil birokrasi di Indonesia bukan hanya karena alasan efisiensi, tetapi dilakukan untuk tujuan yang lebih utuh,

seperti meningkatkan inovasi, produktivitas, dan daya saing mengelola peluang yang terjadi di dunia global. Melalui digital *space* seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan yang lainnya, partai politik dapat membuat desain program tidak hanya untuk kebutuhan elektoral yang sesaat, tetapi memperkuat jejaring komunikasi internal partai politik (antara kader dan pengurus partai di semua tingkatan), antar partai politik (mengelola kompetisi politik), dan tata kelola partai politik secara sistemik (*re-organizing*) berdasarkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi (Chadwick, 2006). Menggunakan digital *space* untuk kepentingan pengambilan keputusan sangat penting karena bersifat dinamis dan *real time*, serta sangat berbeda jika dilakukan secara manual. Penggunaan teknologi untuk mengelola kelembagaan partai politik dalam menjalankan fungsinya akan dapat menggabungkan beragam informasi dalam skala yang sangat besar yang sebelumnya terpisah, dan mampu menciptakan era baru seorang pemimpin partai politik dalam setiap tingkatannya, yang mampu menampilkan korelasi-korelasi antar variabel yang sulit terdeteksi dan hampir mustahil dilakukan. Cara tersebut, akhirnya, akan memperkuat basis partai politik secara sistemik dan hasil keputusannya lebih responsif mengelola aspirasi masyarakat berdasarkan *evidence-based*.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Partai Politik Digital yang Agile

Jalur komunikasi partai politik harus dilakukan untuk menjangkau pemilih yang telah berkembang sangat kompleks dari profil geografis dan demografinya, apalagi seperti Indonesia. Komunikasi partai politik juga ditentukan oleh norma-norma demokrasi yang dapat diterapkan secara wajar dan ditentukan oleh ketersediaan perkembangan teknologi. Itulah pentingnya partai politik digital yang akan mempermudah partai politik menjangkau pemilihnya untuk membuat keputusan berbasis data menjadi solusi dari masalah yang dialami para pemilihnya. Organisasi partai politik di era digital memerlukan beberapa prakondisi, seperti sumber daya manusia pengelola yang berkualitas, integrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan berkolaborasi dengan masyarakat serta para tokoh



lokalnya. Saat inilah, diperlukan konsep *agile* yang akan mempermudah partai politik melakukan re-organisasinya. Meskipun, konsep *agile* ini lebih tepat digunakan oleh organisasi dengan tata kelola yang sangat kaku seperti birokrasi (Cooke, 2012). Tetapi, kebiasaan birokrasi yang lamban itu, ternyata menular di institusi lain seperti partai politik yang semestinya bisa sangat *agile* mengelola kelembagaannya. Konsep *agile* bukanlah tujuan, tetapi syarat untuk mendorong transformasi partai politik agar bekerja lebih strategis.

Kesulitan menerapkan *agile* di partai politik Indonesia disebabkan beragam alasan, utamanya partai politik bukanlah lembaga profit dan bukan pula bagian lembaga negara formal yang patut dipaksa untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sumber daya partai politik berasal dari masyarakat, namun bukan berarti partai politik yang dikategorikan sebagai partai mapan tidak memiliki sumber daya yang bisa didapatkan secara rutin, seperti salah satunya mendapatkan bantuan pemerintah yang dihitung dari perolehan suara partai politik saat pemilihan umum. Kajian tentang sumber daya partai politik di Indonesia seperti sumber pembiayaan sering berujung pada masalah hukum. Tak satu pun dari tiga elemen yang menjadi dasar pembiayaan (iuran anggota, sumbangan, dan subsidi negara) yang berhasil membiayai partai politik secara efektif (Mietzner, 2015). Sebagaimana juga pengelolaan partai politik di negara-negara demokrasi, tetap saja muncul persoalan sumber pembiayaannya seperti Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat (nytimes.com, 2022), begitu pula di negara demokrasi lainnya. Namun, dengan menggunakan teknologi, sumber pembiayaan partai politik di negara tersebut, relatif bisa dipantau dengan mudah. Kondisi ini, tentu disadari sepenuhnya oleh elit politik dan pemerintah kita. Setidaknya, peraturan partai politik mengalami beberapa kali perubahan dan sangat perlu terus menerus disempurnakan agar fungsi partai politik berjalan sesuai persyaratan demokrasi. Termasuk, KPK pun turut aktif melakukan kajian tentang pengelolaan partai politik (KPK, 2014). Menguatnya ekspektasi masyarakat tentang perubahan pola pengelolaan partai politik membuktikan semakin diperlukannya konsep *agile* dalam menata kembali kelembagaan partai politik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Transformasi Partai Politik Menjadi Partai Digital

Fenomena disrupsi bermula dari *private sector*, yang kemudian menghasilkan beragam keuntungan bagi industri maupun masyarakat. Prinsip demokrasi terlihat jelas dalam fenomena disrupsi itu, seperti setiap individu secara rasional, dapat menentukan pilihannya dari beragam layanan yang disajikan dalam berbagai *platform* digital. Para pengusaha berlomba memberikan berbagai inovasi kepada calon konsumennya untuk menentukan pilihan yang menguntungkan bagi setiap individu. Fenomena ini akan semakin dinamis ketika lingkungan kita sulit dikendalikan karena disrupsi. Disrupsi muncul di masyarakat modern karena kemajuan teknologi dan mobilitas individu yang sangat tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan ekspektasi masyarakat akan semakin mendominasi *digital space* yaitu tentang segala bentuk kehidupan sehari-hari kita. Mayoritas penghuni digital (*native digital*) yang berusia muda, akan semakin bebas masuk ke ruang-ruang privat manusia sebagai individu, apalagi mereka akan begitu bebasnya memberikan opininya tentang kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Tentu, apabila tidak diantisipasi dengan baik, fenomena disrupsi dan *digital space* akan berubah menjadi ancaman serius bagi negara.

Kehadiran *artificial intelligence*, *big data*, *cloud computing*, *Internet of Things (IoT)*, memberi ruang konektivitas antar organisasi yang begitu lebar tanpa mengenal sekat waktu dan lokasi. Lahirnya industri seperti Google, Apple, Samsung, Amazon, Tesla, Whatsapp, Amazon, Spotify, sementara di Indonesia ada Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan lain sebagainya menandakan revolusi industri telah masuk dalam kehidupan sehari-hari dan terkadang menimbulkan ketergantungan. Perubahan pola hidup kita yang sangat cepat itu akan memberikan efek yang sulit kita duga dan sering memunculkan ketidakpastian. Perubahan seperti ini, harus dilihat secara cermat oleh partai politik, meskipun masih ada yang berpendapat bahwa ada logika yang berbeda antara tujuan industri (*private sector*) dengan partai politik. Partai politik, terutama melalui elitnya, harus benar-benar menyadari bahwa *forecasting extrapolatif* yang mengandalkan data



manual masa lalu untuk memprediksi masa depan, menjadi sangat tidak relevan menjawab tantangan dan peluang masa kini yang tidak memiliki bentuk. Jika kita menyadari sangat pentingnya fungsi partai politik yang menjadi sumber daya negara untuk mengelola kekuasaan, maka akar masalah melakukan transformasi yang *agile* di partai politik menuju partai digital akan semakin mudah dan cepat terjadi dilakukan.

Meningkatnya intensitas penggunaan teknologi dan mobilitas masyarakat dunia akan berakibat pada semakin lebarnya *borderless* antarnegara. Para aktor dengan beragam motifnya yang saling terhubung, akan membuat semakin meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat yang dapat dikelola partai politik untuk terlibat aktif menetapkan keputusan, yang di masa lalu sering menggunakan pendekatan pilihan rasional. Kompleksitas permasalahan yang muncul di masyarakat, membuat partai politik dituntut pemilihnya melakukan sesuatu membantu mencari solusinya. Kesenjangan generasi di internal partai politik, harus menjadi perhatian serius untuk segera bertransformasi. Elit partai politik kita yang menjadi pengurus inti dari era generasi *baby boomer* (1946-1967) dan generasi X (1968-1980) dipaksa menghadapi kompleksitas masalah yang berbeda dari masa lalu dan harus membuat keputusan yang sesuai keinginan para pemilih yang mendominasi dunia digital yaitu generasi milenial (1981-1994) dan generasi Z (1995-2010). Secara kelembagaan, partai politik akan menghadapi kesenjangan antar generasi (*generation gap*) tentang harapan dan cara kerja yang sama sekali berbeda dari masanya (Kornelsen, 2019). Sebagai contoh, cara generasi Milenial dan generasi Z menyampaikan aspirasi selalu menggunakan *platform* media sosial ketimbang cara-cara yang manual. Kondisi itu terlihat dari piramida pengguna internet di Indonesia yang didominasi kelompok usia 13-18 tahun sebesar 99,16% dan usia 19-34 tahun sebanyak 98,64%. Kelompok kedua generasi ini, perlahan akan menjadi pelaku atau aktor untuk menentukan kebijakan. Kedua kelompok generasi itu pula yang kesulitan mendapatkan tempat sebagai aktor di partai politik, yang berbanding terbalik dengan perusahaan *start up*. Industri *start up* memberikan porsi yang sangat besar dari kalangan kedua generasi itu untuk terlibat menghasilkan inovasi mengatasi masalah masyarakat. Kebanyakan partai politik di Indonesia tidak memiliki program

the nurturing of talent, skills, and abilities bagi anak-anak muda yang sangat berkeinginan turut serta di politik.

Transformasi partai politik menuju organisasi partai era digital, menjadi sebuah keniscayaan, agar lahir kelembagaan partai politik modern yang dikelola dengan menggunakan kekuatan *digital space*. Formulasi dan model yang telah diterapkan *private sector* sangat memungkinkan untuk diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan aturan di internal partai. Sistem kepartaian dan komitmen Indonesia tentang digitalisasi, menurut saya, sangat memungkinkan partai politik melakukan transformasi itu. Partai politik di era digital, membutuhkan kualifikasi dan kapasitas baru, yang mampu mengelola kelembagaannya melakukan fungsi partai untuk menyemaikan bibit demokrasi yang akan melahirkan kesejahteraan bersama. Selain kualifikasi dan kapasitas baru, elit dan pengurus partai politik harus memiliki kemampuan berpikir inovatif agar selalu menemukan solusi dari masalah masyarakat yang diintegrasikan dengan *social behavioral skills*. Keterampilan perilaku sosial itu sangat penting karena di situlah letak keberhasilan kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi meski selalu mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan. Kemampuan kolaboratif ini sangat penting di era disrupsi karena tidak ada satu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cara kerja individual.

Menjadi partai digital tidak sekedar menggunakan *platform* digital, namun diperlukan *digital value* yang utuh yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif. Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang *agile*, menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital. Metode transformasi yang *agile* ini akan mengubah pola pikir elit dan pengurus partai politik untuk menetapkan keputusan mengelola kelembagaannya sekaligus mengikis mentalitas enggan berbagi (*silo mentality*) antar kader partai politik. Ketika syarat *agile* dijadikan sebagai keputusan, maka akan sangat berpotensi mengubah cara kerja organisasi partai politik, terutama di kalangan elit dan pengurus partai. Pengelolaan organisasi partai politik akan fokus menghasilkan ide inovatif berbasis *evidence-based* yang penuh



dengan data yang saling berkaitan. Pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah bagaimana melakukan transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital?

Pertama, partai politik perlu memperkuat basis operasional dari ideologinya seperti, meminjam istilah ilmu marketing, menyusun proses bisnis dengan prinsip *value proposition*, yaitu membangun nilai organisasi untuk cepat mengubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang transparan, menghindarkan *intermediary*, interaktif, adaptif, dan responsif (Ulrich, & Brockbank, 2005). *Value proposition* akan membawa partai politik menetapkan layanan dari fungsi partai dalam proses yang panjang seperti mengidentifikasi dan memiliki manajemen risiko yang akan muncul sejak awal. Kualitas layanan yang dihasilkan partai politik akan meminimalkan dampak yang muncul dari berbagai perubahan. Mengubah pola kerja manual menjadi digital dan mengikuti perubahan pola yang telah dilakukan itu ke dalam prinsip organisasi yang telah dikembangkan di *private sector*.

Kedua, karakter kepemimpinan yang *hyperleader* (Gerbaudo, 2019), yaitu karakter pemimpin yang memiliki semangat kuat untuk menjadi representasi partai yang tidak alergi beradaptasi ketika terjadi perubahan lingkungan yang sulit diprediksi. *Hyperleader* memiliki dua kemampuan sekaligus yaitu menjadi sosok yang menampilkan pesona populer agar menjamin keberlangsungan partai dan memiliki kemampuan adaptasi yang fleksibel dari gangguan sumber daya apa saja, dari siapa saja, dan kapan saja.

Ketiga, mengutamakan pendekatan *voters-centric*. Para pemilih (*voters*), memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan partai politik. Para elit dan pengurus partai perlu membebaskan dirinya dari *first law of organization gravity*, yaitu situasi yang membuat orang-orang di dalam organisasi menghindari pertemuan dengan *voters* secara langsung. Penerapan *voters-centric* ini akan membuat partai politik membangun basis relasinya sendiri secara langsung (*end to end*) untuk menghindari

adanya kekeliruan dan bahkan mengabaikan *intermediary* atau broker politik yang selalu menjadi penghalang. Penggunaan teknologi akan sangat membantu proses *end to end* tanpa *intermediary* atau broker di partai politik.

Keempat, investasi membangun sumber daya agar memiliki *mega shift skill* yang cepat ketika terjadi perubahan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Menemukan solusi dari masalah yang terjadi khususnya di basis konstituen partai politik. Keperluan untuk membangun dan menggunakan *artificial intelligence, machine learning, algorithm*, dan lain sebagainya bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur ICT, tetapi juga sumber daya manusia. Membangun ICT di partai politik adalah satu soal yang penting, tetapi sumber daya manusianya juga harus dipersiapkan. Misalnya, ketika IoT yang melahirkan revolusi organisasi, maka yang menjadi dasarnya adalah cara kerja antar mesin. Namun, partai politik perlu mengombinasikan cara kerja mesin dan manusia untuk melahirkan keputusan strategis partai politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Menggabungkan kedua cara kerja tersebut, oleh Mergel (2016) disebut sebagai *strategic sensitivity* yang dilatih terus menerus agar partai politik melahirkan kepemimpinan strategik yang baru (Collins, 2009).

Bapak dan Ibu dan para hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup pidato ini, saya ingin kembali menggarisbawahi bahwa transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital, tidak hanya diperlukan untuk memberi penguatan kelembagaan partai menjalankan fungsinya sekaligus memperkuat demokrasi di Indonesia. Tetapi lebih dari itu, partai politik akan memiliki paradigma baru untuk menjawab tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Partai politik yang memiliki paradigma baru akan lebih transparan dan mengelola partisipasi politik masyarakat yang jauh lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Sebagai organisasi non negara sekaligus non profit, partai politik sangat sulit mengabaikan penggunaan teknologi serta penguasaan kapasitas digital. Bahkan tantangannya adalah jika partai



politik mampu bertransformasi menjadi organisasi partai yang mengelola digital space sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru di dunia yang cepat sekali berubah dan sangat sulit diprediksi maka akan menjadi *best practices* pembelajaran bagi anak bangsa. Demikian gagasan saya tentang satu tema penting dari Politik Digital yaitu Transformasi Partai Politik Menjadi Organisasi Partai di era Digital untuk Penguatan Demokrasi. Sebelum pidato ini saya akhiri, mohon izin untuk menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan saya berdiri di depan hadirin yang mulia.

Ucapan terima kasih yang pertama saya tujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan jabatan fungsional/akademik sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik. Terima kasih saya sampaikan kepada Para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik USU yang telah menyetujui serta mengusulkan saya sebagai Guru Besar. Kepada Biro SDM USU dan timnya, saya sampaikan ucapan terima kasih karena telah mengawal proses administratif di USU dan Jakarta. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Dekan dan para Wakil Dekan FISIP USU, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan FISIP USU, para Guru Besar FISIP USU, seluruh Ketua/Sekretaris Prodi di FISIP USU, terutama Ketua/Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP USU yang telah mengusulkan kenaikan jabatan fungsional/akademik dan pangkat saya.

Kepada seluruh guru saya yang telah mengajarkan ilmu dan kebajikan selama ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menghaturkan terima kasih kepada: (1) Seluruh guru saya di SD Taman Sarjana, SMP Pertiwi, dan SMAN 3 Medan; (2) seluruh Dosen di FISIP USU; (3) Para pembimbing saya saat menempuh pendidikan di USU: Drs. Ridwan Rangkuti, MA, Drs. Robinson Sembiring, MA (alm.); (4) Promotor dan co-Promotor saya Prof. Amir Santoso, Prof. Burhan Magenda (alm.), Dr. Isbodroini, MA. (5) Para mentor saya: Prof. Subhilhar, Prof. Arif Nasution, Prof. Pratikno, Prof. Maswadi Rauf, dan Dr. Haryadi. Kepada para Wakil Rektor: Pak Edy, Pak Arifin, Bu Poppy, Prof. Opim, dan Pak Luhut serta

sekretaris universitas Prof. Fidel, saya ucapkan terima kasih karena kekompakannya. Terima kasih untuk SNN yang telah bersama-sama menjalin persahabatan yang sangat sulit untuk dilupakan. Terima kasih kepada Bang Hendra Harahap (alm.), Bang Husni Tamrin, Bang Taufan Damanik, Kak Evi Ginting, Kak Mona, Bang Saladin, Bang Junjungan, Bang Irfan, Bang Yance, Bang Onan, Mas Heri, Pak Toni, Bang Tamrin, Pak Tunggul, Mas Warjio, Bang Fauzan, Ema, Andi, dan yang lainnya yang telah membantu saya selama menjadi Dekan FISIP USU. Kepada Dewintha, Nova yang sehari-hari selalu cerewet mengingatkan saya, seluruh staf humas, windy siregar, fahmi, januardi, mansur, liza, penghuni rumah dinas 44, dan *security* yang selalu berkoordinasi demi kelancaran kegiatan saya, Mas Nurdi dan Agus saya mengucapkan terima kasih yang telah membantu urusan teknis administratif pengusulan Guru Besar saya.

Selama menempuh kuliah dan bekerja, saya mendapat dukungan dan kasih sayang dari saudara-saudara saya: Adek, Omi (alm.), Omo, dan Aci. Bulek Er (alm.), bulek Juni, bulek Butet, Paklek Nurman, Pakde Jumilan, kepada adik-adik ipar saya terima kasih atas dukungan moralnya. Kepada bapak dan ibu mertua saya Bapak Ir. Sudiono (alm.) dan Ibu Elvi Koto (alm.), terima kasih telah mengizinkan putrinya menjadi pendamping hidup saya. Saya tidak mungkin berdiri di depan mimbar terhormat ini tanpa pengorbanan dari kedua orang tua saya. Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada Abah dan Mamak saya: Abah Muin Sudarmo (alm.) dan Mamak Ruyanti. Terakhir, kepada seorang wanita yang paling penting dalam hidup saya, istri saya, Novi Susanti, dan kedua putra saya: Atah dan Faris, satu putri saya: Uva. Terima kasih kalian telah banyak berkorban untuk mendukung cita-cita saya. Sebelum menutup pidato ini, perkenankanlah saya mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersabar mendengarkan pidato pengukuhan Guru Besar saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas budi baik Ibu/Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan selama menerima Ibu dan Bapak di acara pengukuhan ini.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thoriq

Wassalammu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Daftar Pustaka

- APJII dan SRA Consulting. Juni 2022. Profil Internet Indonesia 2022. Diakses pada 25 Februari 2023, dari <https://online.fliphtml5.com/rmpye/ztxb/#p=1>.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Calderaro, A. (2014). *Internet Politics Beyond the Digital Divide* (pp. 3–17). https://doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2_1
- Chadwick, A. (2006). *Internet politics: States, citizens, and new communication technologies*. Oxford University Press, USA.
- Collins, J. (2016). *Good to great: Why some companies make the leap and others don't*. Instaread..
- Cooke, J. L. (2012). *Everything you want to know about Agile: how to get Agile results in a less-than-Agile organization*. IT Governance Ltd.
- Cross, W. P., & Pilet, J. B. (Eds.). (2015). *The politics of party leadership: A cross-national perspective*. Oxford University Press.
- DataIndonesia.id. 13 Juni 2022. Remaja Paling Banyak Gunakan Internet di Indonesia. Diakses pada 25 Februari 2023, dari <https://dataindonesia.id/Digital/detail/remaja-paling-banyak-gunakan-internet-di-indonesia-pada-2022>.
- Druckman, J. N., Kifer, M. J., & Parkin, M. (2009). Campaign communications in US congressional elections. *American Political Science Review*, 103(3), 343-366.
- Gerbaudo, P. (2019). The platform party: The transformation of political organisation in the era of big data. In *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data* (pp. 187-198). London: University of Westminster Press.
- Gibson, R. K., Lusoli, W., & Ward, S. (2005). Online participation in the UK: Testing a 'contextualised' model of Internet effects. *The British Journal of Politics and International Relations*, 7(4), 561-583..

- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge.
- Harmel, R., Svåsand, L. G., & Mjelde, H. (2019). Party institutionalisation: Concepts and indicators. *Institutionalisation of political parties: Comparative cases*, 9-24.
- Howard, P. N. (2010). *The digital origins of dictatorship and democracy: Information technology and political Islam*. Oxford University Press.
- insiderintelligence.com. 16 Februari 2023. Digital Ad Spend. Diakses pada 26 Februari 2023, dari <https://www.insiderintelligence.com/topics/category/digital%20ad%20Ospend>.
- Jovanovski, T., & Muric, M. (2011). The phenomenon of lag in application of the measures of monetary policy. *Economic research-Ekonomiska istraživanja*, 24(2), 154-163.
- Keban, Y. T. (2019). The Complexities of Regional Development Planning Reform: The Indonesian Case. *Policy & Governance Review*, 3(1), 12-25.
- Kitchin, R. (2014). Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. *Big data & society*, 1(1), 2053951714528481.
- Kornelsen, J. (2019). The quest to lead (with) millennials in a VUCA-world: Bridging the gap between generations. *Leading in a VUCA world: Integrating leadership, discernment and spirituality*, 27-41.
- KPK RI. (2014). Buku Panduan, SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/buku/buku-saku-sistem-integritas-parpol>.
- Mergel, I. (2016). Agile innovation management in government: A research agenda. *Government Information Quarterly*, 33(3), 516-523.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587-610.



- nasional.kompas.com. 9 Februari 2023. Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho. Diakses pada 27 Februari 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/11362471/jokowi-60-persen-belanja-iklan-media-diambil-platform-asing-ini-sedih-lho>.
- nytimes.com. 29 Januari 2022. Democrats Decried Dark Money. Then They Won With It in 2020. Diakses pada 23 Februari 2023, dari <https://www.nytimes.com/2022/01/29/us/politics>.
- Postill, J. (2020). Digital politics and political engagement. In *Digital anthropology* (pp. 165-184). Routledge.
- Pye, L. W., & Verba, S. (2015). *Political culture and political development*. Princeton University Press.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate selection methods: an analytical framework. *Party politics*, 7(3), 297-322.
- Rauf, M. (2001). Konsensus dan konflik politik. *Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*.
- Seliger, M. (2019). *Ideology and politics*. Routledge.
- Sikk, A. (2022). Institutionalisation of Political Parties: Comparative Cases.
- Smith, A. (1937). *The wealth of nations [1776]* (Vol. 11937). na.
- Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005). *The HR value proposition*. Harvard Business Press.
- Vaccari, C. (2008). Research note: Italian parties' websites in the 2006 elections. *European Journal of Communication*, 23(1), 69-77.
- wearesocial.com. 2022. *Special Report Digital 2022, Your ultimate guide to the evolving digital world*. Diakses pada 24 Februari 2023, dari <https://wearesocial.com/us/blog/2022/01>.
- Wolinetz, S. B. (2002). Beyond the catch-all party: approaches to the study of parties and party organization in contemporary democracies. *Political parties: Old concepts and new challenges*, 136-165.



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muryanto Amin
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 September 1974
NIP/NIDN : 197409302005011002 / 0030097401
Institusi : Universitas Sumatera Utara
Program Studi : Ilmu Politik

Keluarga

Nama Ayah : Muin Sudarmo (Alm.)
Nama Ibu : Ruyanti
Nama Istri : Novi Susanti
Nama Anak : Muhammad Annas Fatah Rizqin
Ramadhani Tuhva Norif
Idra Faris

Riwayat Pendidikan

SD Taman Sarjana Medan (1986); SMP Pertiwi Medan (1989); SMA Negeri 3 Medan (1992); Sarjana Ilmu Administrasi Negara FISIP USU (1997); Magister Program Studi Ilmu Politik FISIP UI (2008); Doktor Program Studi Ilmu Politik FISIP UI (2013).

Riwayat Pekerjaan

Rektor Universitas Sumatera Utara (2021-2026); Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (2016-2021); Dewan Riset Daerah Kota Medan (2015-2020); Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Asahan (2020); Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Medan (2018); Pemimpin Redaksi Jurnal Politea Ilmu Politik (2005-Sekarang); Dewan Kota Medan (2013-2018); Komisaris PTPN V (2013-2016).

Kursus

Social Investment, European Studies Ferrostaal, Jerman dan Portugal (2011); Academic Writing AUSAID, Adelaide, Flinders University (2009); Political Youth Leadership, USAID, Athens, Ohio University, USA (2006).

HKI

Modul Pembelajaran Digital Wawasan Kebangsaan (000289520), 23 November 2021; Modul Pembelajaran Digital Radikalisme (000289524), 23 November 2021; Modul Pembelajaran Digital Multikulturalisme (000289525), 23 November 2021; Modul Pembelajaran Digital Kearifan Lokal (000289808), 23 November 2021; Students Motivator (000192896), 3 Juli 2020.

Penghargaan

Pemimpin Terpopuler di Media Sosial, Kategori Pemimpin/CEO, Subkategori Rektor Jambore PR Indonesia (2022); The Best Presenter International Conference on Social and Political Science UIN Sunan Gunung Djati, Bandung (2019); Satyalancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia (2017).



Publikasi (5 Tahun Terakhir)

- Amin, M., Humaizi, H., Rahmadani, S., & Yusuf, M. (2022). Political Power Shift in the House of Representative of North Sumatra Province, Indonesia: A Political Communication of Post-election.
- Amin, M., & Ritonga, A. D. (2022). The Differential Effect of Women Politicians' Communication, Efficacy, and Ideology in Building Citizens' Political Satisfaction and Trust: A Case of a Developing Nation. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(4), 87-105.
- Amin, M., & Ritonga, A. D. (2022). The Application of Learning Based on Local Wisdom at SMA Negeri 1 Medan as an Effort to Development the Character of an Inclusive Nation. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 563-573.
- Amin, M., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2021). Institutional Strengthening of Electoral Commission in Increasing Voter Participation in Medan Mayoral Elections 2020. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 411-417.
- Amin, M., & Nasution, M. A. (2020). Identity Movements, Religious Organisations and Social Harmony in North Sumatra
- Amin, M., & Sembiring, W. M. (2018, March). Local election: does bureaucracy become one of main political power?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*(Vol. 126, No. 1, p. 012097). IOP Publishing.

Buku

- Amin, M. (2020). Peningkatan Kompetensi Pelayanan Aparatur Sipil Negara. USU Press.
- Amin, M. (2019). Peta Kerukunan Antar Agama, Etnis, dan Kelompok di Medan. USU Press.
- Amin, M. (2019). Pemetaan dan Evaluasi Wilayah Rawan Konflik di Medan. USU Press.
- Amin, M. (2018). Rekrutmen & Kaderasi Partai Politik (Inspirasi Sumatera Utara). USU Press.

